

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023**



**JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 79 KEL. WUMIALO
KEC. KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gorontalo, Januari 2024

INSPEKTUR

INSPEKTORAT
DAERAH

MISRANDA E. U. NALOLE, SE, M.Si

NIP. 19651016 199303 2 008





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini merupakan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun, serta mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi, termasuk di dalamnya faktor-faktor hambatan, tantangan, penyebab, dan solusinya. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 diukur melalui 2 (dua) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja telah dicapai dengan baik. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan, capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2023 ini untuk realisasi keuangan mencapai 96,68%. Dengan hasil tersebut kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 dapat dinilai "CUKUP BERHASIL". Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo terjaga konsistensinya. Hal ini didasari oleh evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus, yang hasilnya ditindaklanjuti dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR SEKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu-Isu Strategis	5
E. Keadaan Pegawai	5
F. Keadaan Sarana dan Prasarana	8
G. Keuangan	10
H. Sistematika LKIP	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
C. Rencana Anggaran Tahun 2023	17
D. Instrumen Pendukung	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	22
B. Realisasi Anggaran	36
C. Penghargaan Yang Diterima	42
BAB IV PENUTUP	



LAMPIRAN

Lampiran 1 Strukrut Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2023 – 2026

Lampiran 3 Penghargaan Yang Pernah Dicapai

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023	6
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023	7
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Fungsional Tahun 2023	7
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	14
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023.....	16
Tabel 2.4	Target Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023	17
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023	18
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	18
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023	23
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023	24
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023	26
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Gorontalo Tahun 2023	27
Tabel 3.6	Hasil Evaluasi Indeks Manajemen Risiko Provinsi Gorontalo Tahun 2023	28
Tabel 3.7	Hasil Evaluasi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Provinsi Gorontalo Tahun 2023	28



Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Lalu	29
Tabel 3.9	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo Yang Lalu dan beberapa tahun terakhir	30
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Pemerintah Daerah	31
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Gorontalo s/d Tahun 2023 dalam Dokumen Renstra	31
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Gorontalo s/d Tahun 2023 Tahun 2023 dengan Standar Nasional	33
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023	35
Tabel 3.14	Anggaran dan dan Realisasi Belanja per Sasaran Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	19
Gambar 2.1	Aplikasi SiLET Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	20
Gambar 2.2	Aplikasi Siransija Provinsi Gorontalo	20
Gambar 2.3	Aplikasi Financial Management Information System	20
Gambar 2.4	Akses Aplikasi SIPD Kemendagri	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang



bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai instansi pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja di maksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

B. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mengacu pada landasan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);
 7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

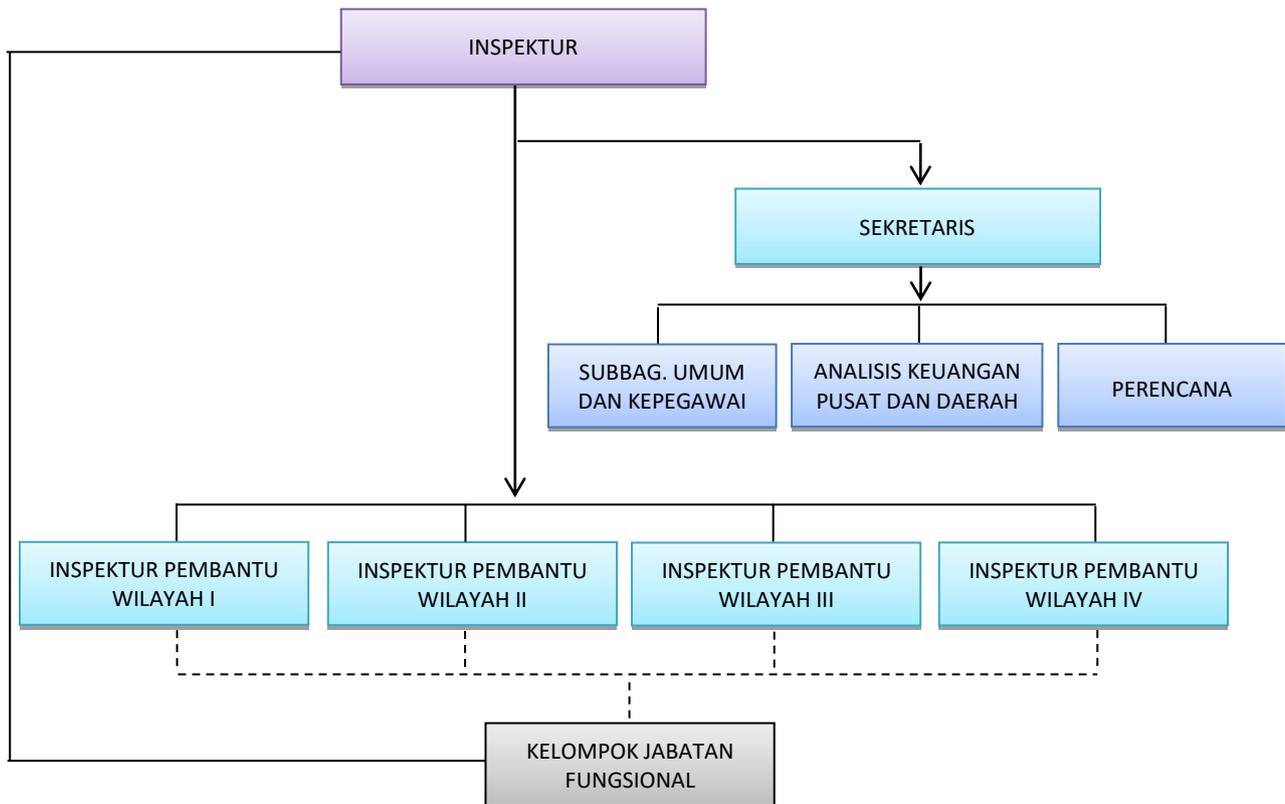
C. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo dibidang pengawasan. Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur Provinsi dengan jabatan Eselon II A
2. Sekretaris dengan jabatan Eselon III A dibantu 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Eselon IV A
 - b. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
 - c. Fungsional Perencana

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV, jabatan Eselon III A
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.



2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan;
- b. Menyusun rencanadan program dibidang pengawasan;
- c. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan
- d. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

D. Isu-isu Strategis

Secara umum isustrategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang ada diInspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
2. Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan ;
3. Belum optimalnya penerapan SPIP di OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo;
4. Masih lambannya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obrik yang diperiksa;
5. Hasil pengawasan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventif, sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ketahun; dan
6. Belum optimalnya kapasitas APIP sebagai *quality assurance*.

E. Keadaan Pegawai

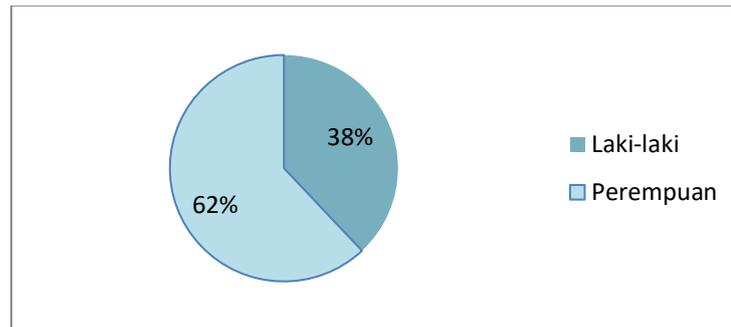
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo didukung oleh sumberdaya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut :



Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
38	62	100

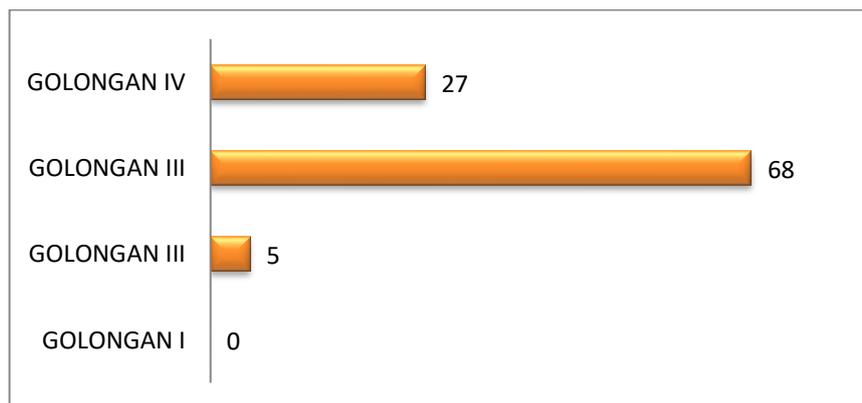
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

GOLONGAN I	GOLONGAN II	GOLONGAN III	GOLONGAN IV
-	5	68	27

Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

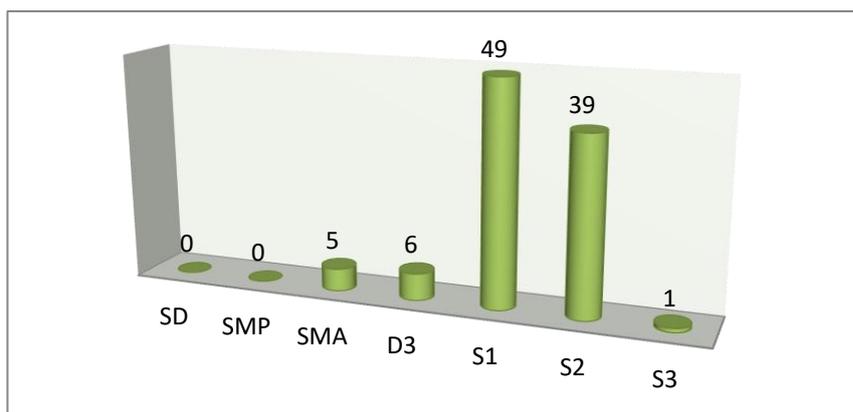




Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
-	-	5	6	49	39	1	100

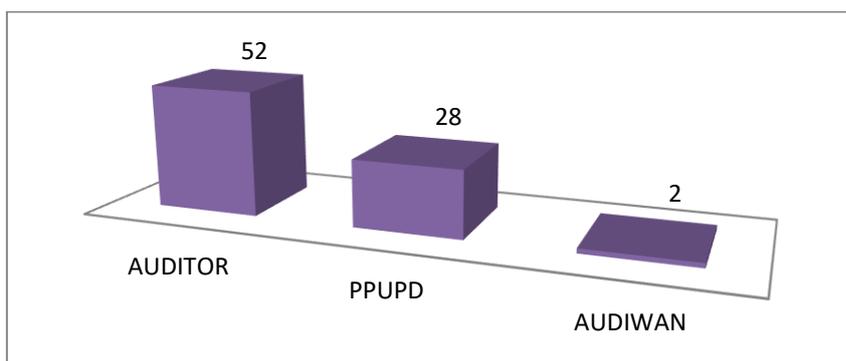
Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023



Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Fungsional Tahun 2023

NO.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Auditor	52
2.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	28
3.	Auditor Kepegawaian (AUDIWAN)	2
4.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	1
Total		83

Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Fungsional Tahun 2023



F. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal utama yang menjadi masalah adalah kurangnya fasilitas yang mendukung pekerjaan sehari-hari yaitu ruang kerjanya semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pegawai yang berada di Inspektorat serta perangkat komputer dan printer (alat cetak) dan mesin elektronik lainnya yang menunjang kegiatan perkantoran.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor	2.629 m ²	Belum ada sertifikat
2	Lemari Penyimpan	1 buah	
3	Filing Cabinet Besi	7 buah	
4	Meja Rapat	16 buah	
5	Meja ½ Biro	26 buah	
6	AC Split	2 buah	
7	Facsimile	3 buah	
8	Sepeda Motor	4 buah	DM 3019 AZ DM 6975 AZ DM 6976 AZ



			DM 6974 AL
9	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		
10	Peralatan Mainframe Lainnya	1 Paket	Program Website
11	Station Wagon	5 buah	DM 201 DM 20 DM 200 DM 202 DM 203
12	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3 buah	
13	Lemari Kayu	19 buah	
14	Brandkas	1 buah	
15	Meja Kerja Kayu	30 buah	
16	Mesin Fotocopy Folio	2 buah	
17	Display	1 buah	
18	Kursi Besi/Metal		
19	Kursi Rapat		
20	Sofa	6 Set	
21	Televisi	5 Buah	
22	Camera Film		
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 buah	
24	Sound Sistem	1 buah	
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15 Buah	
26	Mesin Ketik Manual Standar	2 buah	
27	Meja Rapat	6 buah	
28	Kursi Tamu		
29	Lemari Es	4 buah	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	
31	Jam Mekanis	1 buah	
32	Loudspeaker	1 set	
33	Dispenser	2 buah	
34	Gordyin/Kray	2 set	
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11 buah	
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 buah	
37	Buffet Kayu	5 buah	
38	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5 buah	
39	White Board	2 buah	
40	Alat Penghancur Kertas	2 buah	
41	Slide Projector	2 buah	
42	PC Unit	12 buah	
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	26 buah	
44	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	2 buah	DM 204 DM 205
45	Laptop	2 buah	
46	Lemari Besi/Metal	1 Set	Rak/Lemari Untuk



			Server e-TLHP
47	Microphone/Wireless MIC	3 buah	
48	Meja Resepsionis	1 Set	
49	Server		Server e-TLHP
50	Air Conditioning (AC)	10 buah	
51	LCD Projector/Infocus	4 buah	
52	Layar Proyektor	3 buah	
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1114 m ²	
54	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	111 m ²	Swakelola (Mushollah)
55	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50 m ²	Bangunan Pagar
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	284 m ²	Penataan Halaman Kantor
57	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	800 m ²	Penataan Halaman Kantor
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	36 m ²	Gedung Arsip dan Perpustakaan
59	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	5625 m ²	Renovasi Tempat Parkir Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo
60	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	370 m ²	Penataan Halaman Kantor(Paving Blok)
61	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	48 Buah	

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

G. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo. Pada Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 19.173.351.324,00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 18.993.551.324,- dan Belanja



Modal Rp. 179.800.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp. 20.986.430.110,00,- dengan rincian Belanja Belanja Operasi Rp. 20.726.328.476,- dan Belanja Modal Rp. 260.101.634,-. Disamping itu pula Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN berupa dana untuk penyelenggaraan dekonsentrasi di Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 131.410.000,-.

H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I (PENDAHULUAN)

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo serta Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan SLKIP.

Bab II (PERECANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA)

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN)

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan



data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan juga akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Serta disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang telah ada maupun yang telah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Bab IV (PENUTUP)

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra sangat ditentukan oleh kemampuan Inspektorat Daerah dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan Capaian Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif. Proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan, Penyusunan rancangan akhir, dan Penetapan Renstra dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 28 Juni tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Gubernur Gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2017-2022) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2022-2027). Visi Misi Gubernur Gorontalo pada perencanaan periode 2023-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. RPJPD 2007-2025 dengan Visi pembangunan yang ingin dicapai adalah "Gorontalo Maju dan Mandiri". Visi Provinsi Gorontalo tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu : Gorontalo Maju ialah mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas. Serta Mandiri ialah menunjukkan kehendak



pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan juga bangsa.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengembang salah satu tujuan yaitu Terwujudnya *Good and Clean Government* dan *sasaran* Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan , penjelasan tujuan tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SASARAN			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor Dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2	2	2	2
		Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB
	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai, strategi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi Pengawasan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Pengawasan
		Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengawasan
		Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan berbasis Elektronik
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan
		Peningkatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



		Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah
		Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
		Peningkatan Manajemen Risiko Indeks Perangkat Daerah
		Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2023 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PUPD yang Bersertifikat Profesi	2
		Nilai LKIP Inspektorat	BB
2	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Manajemen Risiko Indeks	Level 3



		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3
--	--	---	---------

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 19.173.351.324,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 18.993.551.324,- dan Belanja Modal Rp. 179.800.000,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp. 20.986.430.110,00 dengan rincian Belanja Belanja Operasi Rp. 20.726.328.476,- dan Belanja Modal Rp. 260.101.634,-. Disamping itu pula Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN berupa dana untuk penyelenggaraan dekonsentrasi di Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 131.410.000,-.

1. Target Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 20.986.430.110,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 20.726.328.476,- dan Belanja Modal Rp. 260.101.634,-.

Tabel 2.4 Target Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Uraian	Target	Presentase
Belanja Operasi	Rp. 20.726.328.476,-	98,76%
Belanja Modal	Rp. 260.101.634,-	1,23%
Jumlah	Rp. 20.986.430.110,-	100%

Tahun 2023 Belanja Operasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo terserap sebesar Rp. 20.031.163.883,- atau sebesar 96,65% sedangkan Belanja Modal terserap Rp. 258.550.000,- atau sebesar 99,40%. Berikut tabel realisasi dan presentase target belanja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 :



**Tabel 2.5 Target dan Realisasi Belanja Inspektorat Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

Jenis Belanja	Target	Realisasi	Presentase
Belanja Operasi	Rp. 20.726.328.476,-	Rp. 20.031.163.883,-	98,75%
Belanja Modal	Rp. 260.101.634,-	Rp. 258.550.000,-	1,27%
Jumlah	Rp. 20.986.430.110,-	Rp. 20.289.713.883,-	100%

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Operasi Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Provinsi Gorontalo**

NO.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Ket.
1	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	17.320.379.580,-	82,53	
2	Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	3,666,050,530,-	17,46	
Jumlah		20.986.430.110,-	100	

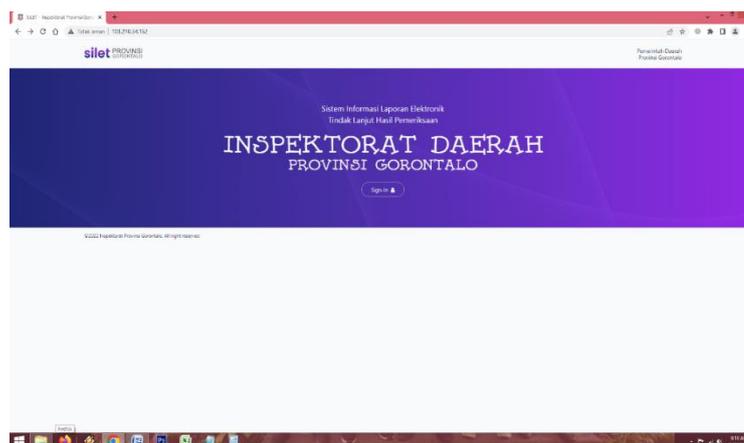
D. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023, digunakan instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan daerah dengan membangun sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah memanfaatkan beberapa sistem informasi baik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun sistem informasi yang dikembangkan oleh Inspektorat sendiri yaitu :

1. Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SiLET)

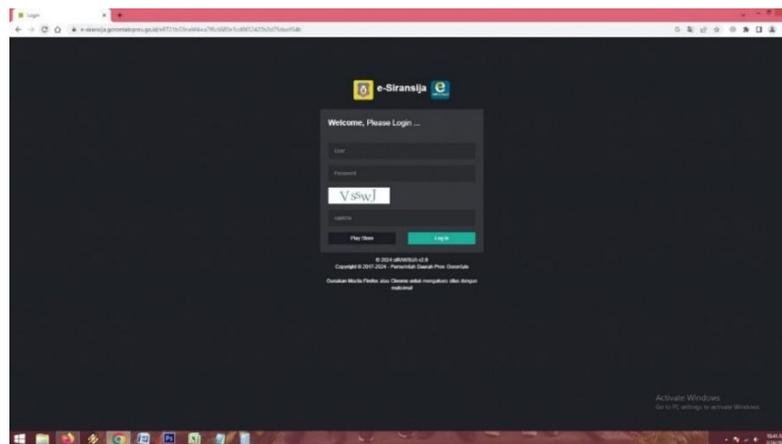
Aplikasi SiLET atau Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan sebuah sistem aplikasi internal Inspektorat Daerah yang membantu APIP dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pengawasan serta memuat proses awal dari sebuah pengawasan sampai dengan laporan dari hasil tindak lanjut baik rekomendasi administrasi maupun TGR.



Gambar 2.1 Aplikasi SiLET Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

2. Sistem Informasi Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija)

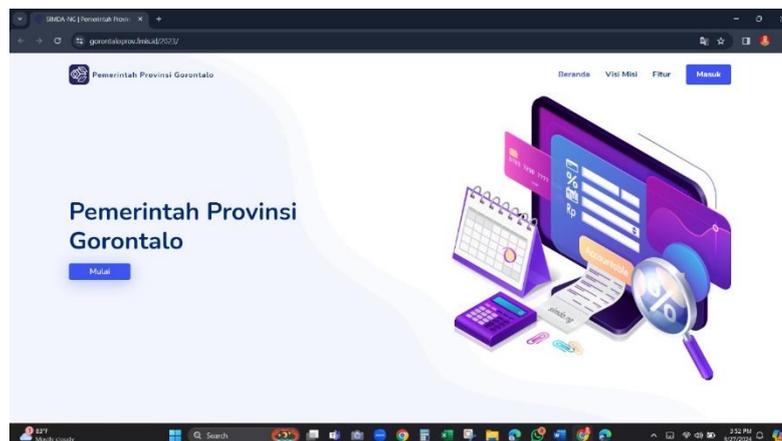
Pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN menggunakan 3 (tiga) unsur dalam Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong. Nilai yang diperoleh dari Aplikasi ini digunakan sebagai dasar perhitungan pemberian Tunjangan.



Gambar 2.2 Aplikasi Siransija Provinsi Gorontalo

3. *Financial Management Information System (FMIS)*

FMIS merupakan sebuah aplikasi untuk melakukan penatausahaan keuangan daerah yang dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini menggantikan SIMDA Keuangan yang sebelumnya pernah digunakan. Dan digunakan secara masif oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pengembangannya, seperti SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan dan SAKIP, dan Cash Management System. SIMDA juga sudah digunakan untuk pertukaran data antara lain dengan pihak perbankan, LKPP, Kementerian Keuangan RI dan BPK RI.



Gambar 2.3 Aplikasi FMIS Keuangan

4. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan

dalam pengambilan keputusan. SIPD memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.



Gambar 2.4 Akses Aplikasi SIPD Kemendagri

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang telah disepakati. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kriteria	Interval Realisasi	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat Rendah	(= 50	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam mencapai target dan sasaran strategisnya, dapat dijelaskan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu :

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :



Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Nilai MCP	Persentase	83	81,50	98,19	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,10	77,75	119,43	

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 2 (dua) indikator dalam mencapai tujuan strategis Terwujudnya *Good and Clean Government*. Pada Tahun 2023 realisasi Nilai MCP sebesar 81,30% dimana nilai ini tidak mencapai target yaitu 83%. Adapun rincian realisasi nilai MCP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Area Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 73,88%,
2. Area Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100%,
3. Area Perizinan sebesar 100%,
4. Area Pengawasan APIP 65,20%,
5. Area Manajemen ASN sebesar 83,93%,
6. Area Optimalisasi Pajak Daerah 73,69%,
7. Area Pengelolaan BMD sebesar 73,01%.

Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah 77,75 dengan kategori “BB”, dimana realisasi ini melebihi target yaitu 65%. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi General dengan nilai 66,36
2. Reformasi Birokrasi Tematik dengan nilai 11,39
3. Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 77,75

Dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja



sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat
Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2	2	100	
	Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	100	
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100	
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100	
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	100	
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 2	66,7	

Pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis sebagaimana pada tabel 3.3 dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1) Jumlah fungsional auditor dan PPUPD yang bersertifikat profesi memiliki target indikator pada tahun 2023 ialah 2 dengan realisasi tahun 2023 ialah 2 atau sebesar 100%. Dan (2) Nilai LKIP



Inspektorat memiliki target indikator pada tahun 2023 ialah BB dengan realisasi tahun 2023 ialah BB atau sebesar 100 %.

b. Sasaran Strategis 2 : Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan

Untuk mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan reformasi birokrasi dengan tujuan Terwujudnya *Good and Clean Government*. Reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme (*clean government*). Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut selaras perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus memenuhi : (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam hal tersebut percepatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya APIP untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3

Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor : PE.09.03/LHP-225/PW31/6/2023 tanggal 30 Oktober 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo hasil evaluasi atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo berada pada Level 3 dengan skor 3,06 sebagaimana uraian berikut :

**Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusi	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,24
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,06

2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,



pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor : PE.07.02/LHP-325/PW31/3/2023 tanggal 28 Desember 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi Maturitas penyelenggaraan SPIP

Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Fokus Penilaian	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
Maturitas penyelenggaraan SPIP	3,994	3,415	-0,579

Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,415 (terdefinisi) atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga).

3. Manajemen Risiko Indeks

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor : PE.07.02/LHP-325/PW31/3/2023 tanggal 28 Desember 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo hasil penilaian atas Indeks Manajemen Risiko (MRI) yang meliputi aspek Perencanaan, Kapabilitas dan Hasil, diperoleh nilai sebesar 3,247 (Level 3), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Hasil Evaluasi Indeks Manajemen Risiko
Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

No.	Area/Komponen	Skor PM	Nilai PM	Skor Evaluasi	Nilai Evaluasi
1	Perencanaan		2,000		1,600
	• Kualitas Perencanaan	5,000	2,000	4,000	1,600
2	Kapabilitas		0,934		0,934
	• Kepimpinan	3,188	0,159	3,188	0,159
	• Kebijakan MR	3,000	0,150	3,000	0,150
	• Sumber Daya Manusia	2,500	0,125	2,500	0,125
	• Kemitraan	2,250	0,056	2,250	0,056
	• Proses MR	3,675	0,459	3,550	0,444
3	Hasil		0,825		0,713
	• Aktivitas Penanganan	2,000	0,375	2,000	0,375
	• Outcomes	4,000	0,450	4,500	0,338
TOTAL			3,775		3,247

4. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi ZP Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor : PE.07.02/LHP-325/PW31/3/2023 tanggal 28 Desember 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo hasil evaluasi atas penyelenggaraan efektifitas pengendalian korupsi diperoleh nilai/indeks sebesar 2,814 {Level 2), dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Hasil Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

Pilar	Bobot	Skor	Nilai
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48,00%		1,272
• Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3,00	0.288
• Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3,00	0.144
• Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,00	0.216
• <i>Power</i> (Kuasa & Wewenang)	14,40%	3,00	0.432
• Pembelajaran Anti Korupsi	9,60%	2,00	0.192



Penerapan Strategi Pencegahan	36,00%		1,062
• Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2,00	0.180
• Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	3,60%	3,00	0.108
• Kepemimpinan Etis	9,00%	3,00	0.270
• Integritas Organisasional	7,20%	3,00	0.216
• Iklim Etis Prinsip	7,20%	4,00	0.288
Penanganan Kejadian Korupsi	16%		0,480
• Investigasi			0.240
• Tindakan Korektif			0.240
Total	100%		2,814

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Yang Lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dari 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

**Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Lalu**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
		2022	2023
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Nilai MCP	82,63	81,50
	Indeks Reformasi Birokrasi	69,61	77,75

Dari tabel diatas menunjukkan untuk Nilai MCP Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami penurunan pada Tahun 2023 dari tahun sebelumnya yaitu 1,13, dimana nilai MCP pada Tahun 2023 adalah 81,50 sedangkan nilai MCP tahun 2022 adalah 82,63.

Untuk Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,14 dari Tahun 2022, dimana nilai Tahun 2023 adalah 77,75 dan nilai Tahun 2022 adalah 69,61.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, capaian kinerja tujuan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo Yang Lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian	
		2022	2023
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2	2
	Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 2	Level 2

Dari tabel tabel di atas capaian dari 5 (lima) indikator sasaran dari Tahun 2022 s/d 2023 telah tercapaian. Sedangkan 1 (satu) Indikator sasaran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dari Tahun 2022 s/d Tahun 2023 belum tercapaian berada di level 2.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Rencana Pembangunan Daerah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja peningkatan tata kelola pemerintahan dibandingkan dengan target RPD dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini :



Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target RPD	Realisasi s/d Tahun 2023	Capaian %	Kriteria/ Kode
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Nilai MCP	98,51	81,5	82,73	
	Indeks Reformasi Birokrasi	66,9	77,75	111,69	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja nilai MCP dan indeks reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPD pada tahun 2023 ini capaian kerjanya sebesar 82,73% dan 111,69% dengan kriteria sangat baik.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah tersebut capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Akhir RENSTRA	Realisasi s/d Tahun 2023	Persentase (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2	2	100	
	Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	100	
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100	



kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100	
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	100	
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 2	66,7	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo samapai dengan Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja capaiannya telah sesuai dengan target
- Masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target dalam kategori sedang

Terdapat 1 (satu) indiaktor kinerja yang belum memenuhi target akhir renstra yakni Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi hanya mencapai 66,7% dan hal ini dikarenakan aspek penerapan strategi pencegahan yaitu asesmen dan mitigasi risiko korupsi, dimana penilaian risiko yang dilaksanakan oleh OPD menggunakan skala risiko dengan beberapa kriteria penilaian diantaranya kerugian keuangan negara yang merupakan salah satu delik korupsi, namun risk register yang dlsusun masih belum memuat mengenai risiko-risiko *fraud*. Serta saluran pelaporan yang efektif dan kredibel, dimana unit kerja menyelenggarakan sistem whistleblowing internal dan cukup berfungsi, secara umum sikap terhadap pelapor cukup positif dan niat whistleblowing pada tataran sedang. Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan. Pegawai telah memahami keberadaan saluran whistleblowing internal karena telah dilakukan sosialisasi atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020

tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (WhistleBlowers System) dan aplikasinya. Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor cukup positif, namun belum dimanfaatkan karena tidak dapat diakses secara langsung oleh pegawai/stakeholder (terbatas).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja tujuan strategis dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2	-	-	
	Nilai LKIP Inspektorat	BB	-	-	
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100	
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100	
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	100	
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 2	Level 3	66,7	



Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 yaitu level kapabilitas APIP dan tingkat Maturitas SPIP dan manajemen risiko indeks capaian kerjanya sangat tinggi yaitu 100%. Sedangkan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi masih 66,7%.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah. Program-program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian program-program tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
9. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
10. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi



6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi atas penggunaan sumber daya diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Capaian Kinerja} - \text{Serapan Anggaran}$$

Keterangan dari rumus :

- Target kinerja tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan EFISIEN
- Target kinerja belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF
- Dikatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatakan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100%

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023 pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	% Efisiensi	Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	100	96,06		Efisien
		Nilai LKIP Inspektorat	100	96,06		Efisien
2	Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	96,68		Efisien
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	99,58		Efisien
		Manajemen Risiko Indeks	100	99,58		Efisien



		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	66,7	99,58		Belum Efisien
--	--	---	------	-------	--	------------------

Berdasarkan data pada tabel diatas, Inspektorat Provinsi Gorontalo selama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan program/kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target dengan sangat baik yang termasuk dalam kategori efisien. Tetapi masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum pencapaian target dan dalam katerogi belum efisien.

B. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo. Total Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp. 20.986.430.110,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 20.289.713.883,- dengan serapan dana APBD mencapai 96,68%. Dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 696.716.227,- (3,32%). Hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Struktur belanja Inspektorat sebesar Rp. 20.986.430.110,- terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 20.726.328.476,00 dengan rincian realisasi :
 - Belanja Pegawai Rp. 14.485.985.334,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.240.343.142,-Belanja Operasi tercapai realisasi sebesar Rp. 20.031.163.883,- (96,65%)
2. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 260.101.634,- dengan realisasi Rp. 258.550.000,- (99,40%)

Dari total belanja tersebut diatas tercapai realisasi sebesar Rp20.298.713.883,- (96,68%) yang terbagi atas :

- a. Anggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) program yang bersifat penunjang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran program organisasi dalam hal perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian



serta Administrasi Umum sebesar Rp. 17.320.379.580,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.638.812.290,- (79,28%).

- b. Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis (prioritas) yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran program pengawasan sebesar Rp. 3.666.050.530,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.650.901.593,- (99,59%).

Realisasi keuangan dari masing-masing program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Anggaran dan dan Realisasi Belanja per Sasaran pada Inspektorat
Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

No.	SASARAN/ PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	TARGET 2023 (%)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2023			
				2022		2023	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD							
1	Program Penunjang Urusan Peerintahan	17.320.379.580	100	-	-	16.638.812.290	96,06
Sasaran 2 : Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan							
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.381.539.700	100	-	-	2.378.006.891	99,85
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.284.510.830	100	-	-	1.272.894.702	99,09
Jumlah		20.986.430.110				20.289.713.883	

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 20.986.430.110,- dengan Realisasi sebesar Rp. 20.289.713.883,- atau sebesar 96,68%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Bila dilihat secara umum pencapaian kinerja sasaran dan pencapaian kinerja kegiatan dari 3 (tiga) Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dikategorikan baik dan di sisi lainnya masih terdapat kendala ataupun hambatan, hal ini didasarkan karena kurangnya personil baik kuantitas maupun kualitasnya besarnya kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil untuk penyempurnaan LKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah :

1. Adanya sistem informasi yang mampu menyediakan data yang akurat, realible, dan relevan untuk mengukur capaian hasil kinerja
2. Perlunya diciptakan indikator-indikator proses yang lebih terfokus agar hasil kegiatan dapat diukur secara tepat
3. Kegiatan/program yang termasuk dalam LKIP adalah kegiatan yang strategis dan mendukung tercapainya visi dan misi organisasi.
4. Adanya transparansi pelaksanaan anggaran guna lebih mendorong pada pelaksanaan dan peningkatan kinerja dari institusi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
5. Adanya proses pembelajaran yang terus menerus dilakukan oleh setiap strata yang ada di lingkungan Inpektorat Daerah Provinsi Gorontalo, karena salah tugasnya adalah menilai



menilai kinerja dari unit/satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

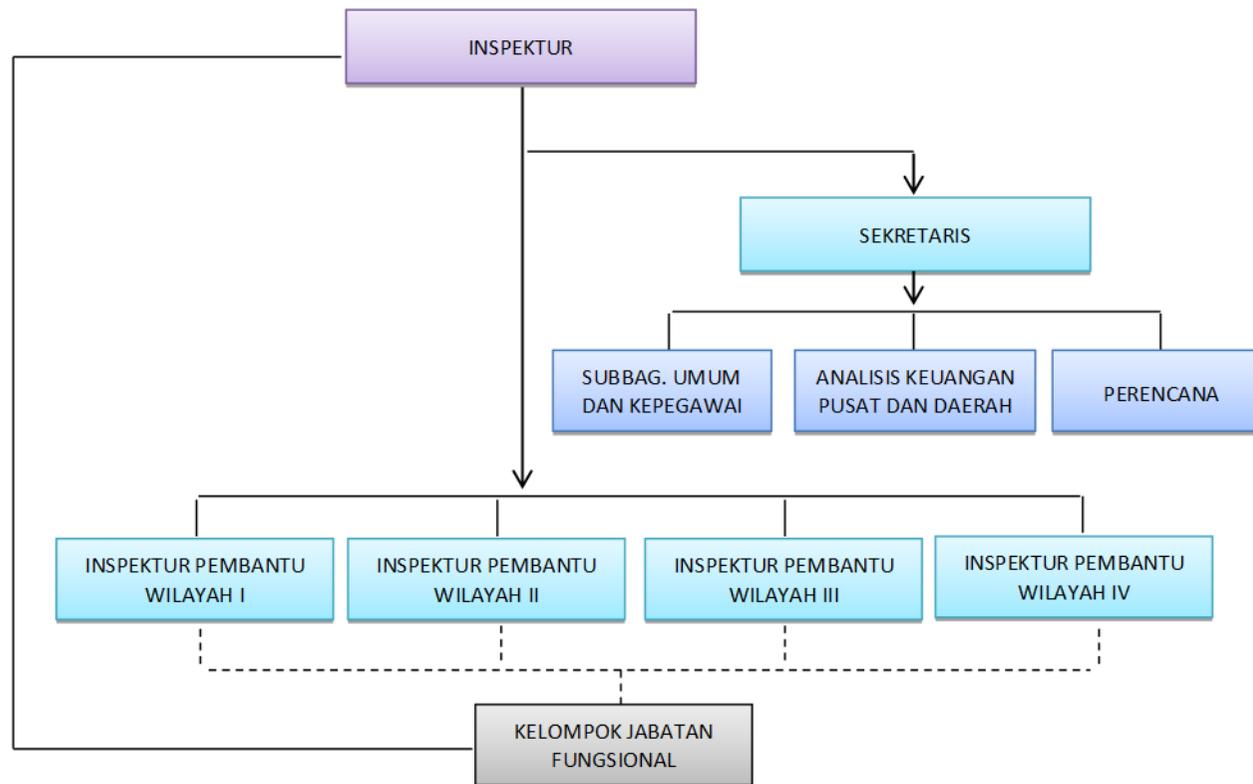
Sebagai sebuah langkah yang berkesinambungan, LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi komitmen bagi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai pemegang amanah dan pada stakeholder sebagai pemberi amanah untuk bersama-sama menciptakan kepemimpinan yang amanah (*Good Governance*).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dibuat dengan harapan segala kritik dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.





Lampiran 1 Struktur Organisasi





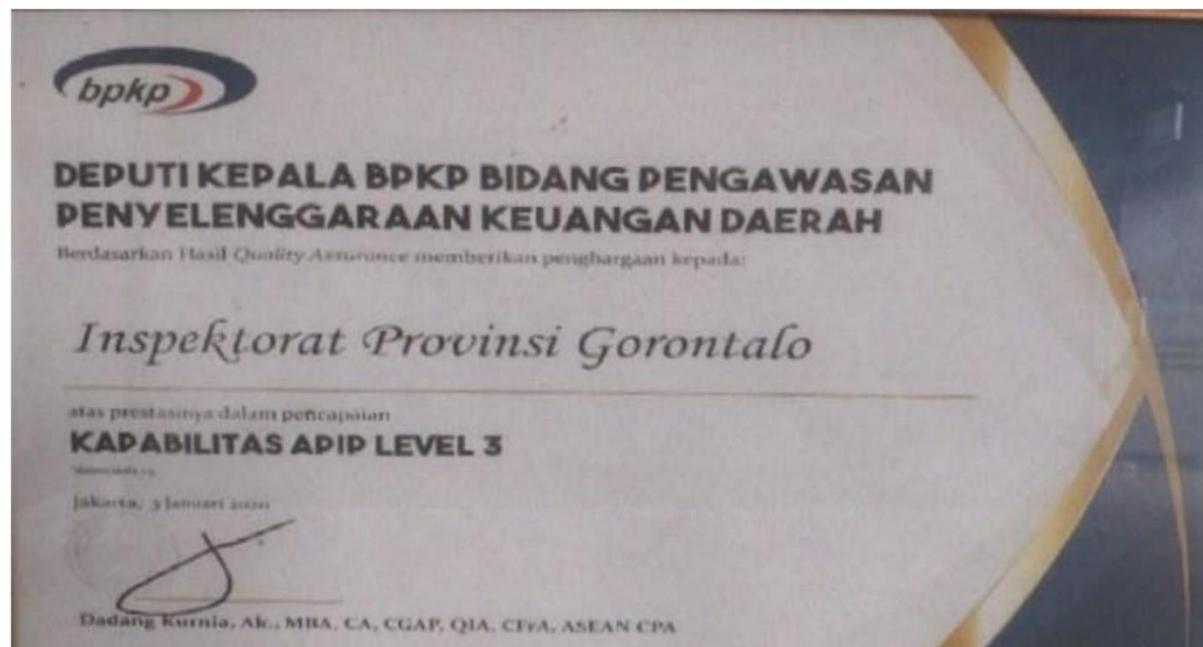
Lampiran 2 Matriks Renstra 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SASARAN			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Opini Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2	2	2	2
			Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB
		Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



Lampiran 3 Penghargaan Yang Pernah Dicapai

1. Kapabilitas APIP Level 3





2. Capaian Maturitas SPIP Level 3



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULA/PENJELASAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang sudah mengikuti Diklat Profesi dan memiliki sertifikat profesi	Level 3
		Nilai LKIP Inspektorat	Nilai LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	BB
2	Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas Kapabilitas APIP (belum dinilai 0/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai 0/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3
		Manajemen Risiko Indeks	Tingkat Manajemen Risiko Indeks (belum dinilai 0/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3

		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Tingkat Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (belum dinilai 0/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3
--	--	---	--	---------

Gorontalo, Januari 2023

J I N S P E K T U R

MISRANDA E. U. NALOLE, SE, M.Si
NIP. 19651016 199303 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MISRANDA E. U. NALOLE, SE, M.Si**
Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E**
Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR GORONTALO**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo,

2023

Pihak Kedua,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Penjabat Gubernur



Ir. **ISMAIL PAKAYA, M.E**

yang diterbitkan oleh BSrE.

Pihak Pertama,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR



MISRANDA EDI UMAR NALOLE, SE., M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPT Yang Bersertifikat Profesi	2
		Nilai LKIP Inspektorat	BB
2	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Manajemen Risiko Indeks	Level 3
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
A. Program Utama/Prioritas		
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.381.539.700,-	APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.284.510.830,-	APBD
B. Program Penunjang		
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 17.120.379.580,-	APBD


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Penjabat Gubernur

Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E
 yang diterbitkan oleh BSrE.


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR

MISRANDA EDI UMAR NALOLE, SE., M.Si
 yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

